

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ARUS URBANISASI DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

RADEN MUHAMMAD ADITYA WARDANA

NPP. 32.0235

Asdaf Kota Palembang , Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Email:rmadityawrdn@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ahmad Ripa'i, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

(Problem Statement/Background (GAP): Urbanization in Palembang City has been increasing rapidly, leading to significant social, economic, and environmental challenges. The government faces difficulties in managing the flow of urbanization effectively, which has contributed to issues such as the proliferation of slums, rising unemployment, and environmental degradation. Collaborative governance involving multiple stakeholders has become essential to address these challenges. However, there are gaps in the effectiveness of these collaborative efforts, with obstacles including coordination issues, limited resources, and differing priorities among stakeholders. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in managing the urbanization flow in Palembang City. **Method:** The research uses a qualitative descriptive approach, gathering data through interviews, observations, and document analysis. Key informants include staff from DISDUKCAPIL, KESBANGPOL, and other relevant stakeholders. The study applies a theoretical framework of Collaborative Governance by Ansell & Gash (2008), evaluating the process based on four dimensions: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaborative process. **Result:** The findings indicate that while collaborative governance has been implemented, its effectiveness is still moderate. Challenges such as inadequate reconciliation of data, insufficient public awareness of the importance of urbanization management, and coordination issues between stakeholders were identified. However, the study highlights positive contributions, such as collaborative planning between DISDUKCAPIL and KESBANGPOL, which helped in the development of strategies to address urbanization-related issues. **Conclusion:** To improve the quality of collaborative governance in managing urbanization in Palembang City, it is crucial to enhance stakeholder coordination, invest in infrastructure, improve public awareness, and strengthen the internal control systems within involved agencies. Moreover, fostering greater digital literacy and community participation are essential to achieving long-term success in managing urbanization..

Keywords: Collaborative Governance, Palembang City Government, Public Services, Stakeholder Collaboration, Urbanization..

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Urbanisasi di Kota Palembang terus meningkat dengan pesat, yang menyebabkan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengelola arus urbanisasi secara efektif, yang berkontribusi pada masalah seperti berkembangnya permukiman kumuh, meningkatnya pengangguran, dan degradasi lingkungan. Collaborative Governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Namun, ada kekurangan dalam efektivitas upaya kolaboratif ini, dengan hambatan yang meliputi masalah koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan prioritas yang berbeda antar pemangku kepentingan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan utama dalam penelitian ini adalah staf dari DISDUKCAPIL, KESBANGPOL, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kerangka teoritis yang digunakan adalah Collaborative Governance oleh Ansell & Gash (2008), dengan menilai proses kolaborasi berdasarkan empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Collaborative Governance telah diimplementasikan, efektivitasnya masih tergolong sedang. Tantangan utama yang ditemukan meliputi ketidaksempurnaan rekonsiliasi data, rendahnya kesadaran publik mengenai pentingnya pengelolaan urbanisasi, dan masalah koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, penelitian ini juga menyoroti kontribusi positif dari kolaborasi antara DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL dalam merumuskan strategi untuk menangani isu-isu yang terkait dengan urbanisasi. **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan kualitas Collaborative Governance dalam penanganan urbanisasi di Kota Palembang, sangat penting untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, berinvestasi dalam infrastruktur, meningkatkan kesadaran publik, serta memperkuat sistem pengendalian internal di instansi terkait. Selain itu, penguatan literasi digital dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam mengelola urbanisasi.

Kata kunci: Collaborative Governance, Kolaborasi Pemangku Kepentingan, Pemerintah Kota Palembang, Pelayanan Publik, Urbanisasi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, mengalami fenomena urbanisasi yang sangat pesat. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, terutama akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota, membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah. Tata kelola kolaboratif menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan ini, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Di tengah krisis dan dinamika yang semakin kompleks, platform digital dapat berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan publik (Polzer & Öner, 2024). Urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu permasalahan seperti meningkatnya angka kemiskinan, bertambahnya permukiman kumuh, serta kesenjangan sosial dan ekonomi. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi perkotaan, tetapi juga menyebabkan kekurangan sumber daya manusia di daerah asal yang ditinggalkan, sehingga memperburuk ketimpangan pembangunan antara wilayah urban dan rural. Tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan implementasi kebijakan kesehatan melalui keterlibatan banyak pihak, meskipun terdapat tantangan komunikasi dan birokrasi yang

menghambat kelancaran implementasi program (Tremblay *et al* , 2024) Di sisi lingkungan, perbedaan prioritas antar kelompok dalam tata kelola kolaboratif terkait masalah lingkungan menunjukkan adanya potensi konflik, meskipun semua pihak memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keberlanjutan (Ambrose *et al*, 2024). Tata kelola kolaboratif memberikan peluang untuk mengadopsi kebijakan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, menciptakan solusi yang adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi di kota-kota tersebut (Alcaide Manthey, 2025)

Fenomena urbanisasi yang cepat ini menuntut adanya kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, dalam mengelola dampaknya secara lebih efektif dan terkoordinasi. Collaborative Governance atau tata kelola kolaboratif menjadi model yang relevan untuk diterapkan dalam penanganan urbanisasi ini, karena dapat melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan bersama, serta membantu menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Inovasi dalam pelayanan publik, seperti pelayanan digital dan integrasi e-government, memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Mao & Zhu, 2025)

Collaborative governance merupakan analisis tata kelola kolaboratif yang menguraikan berbagai konsep dalam rangka menjembatani keterlibatan berbagai pihak berkepentingan (pemerintah dan non pemerintah) dalam penyelenggaraan pelayanan public (Yahya *et al*, 2024) Namun, meskipun sudah ada upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) untuk mengelola arus urbanisasi, implementasi Collaborative Governance di Palembang masih menghadapi berbagai hambatan. Koordinasi yang kurang optimal antara berbagai lembaga, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan prioritas antara pihak-pihak terkait menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, penilaian terhadap kualitas kolaborasi antar pemangku kepentingan serta identifikasi tantangan yang ada menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan urbanisasi.

Seiring dengan berkembangnya masalah urbanisasi, kolaborasi yang lebih baik di antara lembaga-lembaga pemerintah di Kota Palembang sangat dibutuhkan. DISDUKCAPIL yang berperan dalam pengelolaan data kependudukan, dan KESBANGPOL yang fokus pada masalah kesatuan bangsa dan politik, harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengatasi masalah sosial-ekonomi yang muncul, tetapi juga mengelola dampak lingkungan yang timbul akibat urbanisasi yang tidak terkendali.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2020	1,6 juta jiwa
2	2021	1,62 juta jiwa
3	2022	1,65 juta jiwa
4	2023	1,7 juta jiwa

Sumber: BPS, 2019-2023

Peningkatan jumlah penduduk Kota Palembang setiap tahunnya, sebagian besar disebabkan oleh arus urbanisasi. Hal ini menambah tekanan pada sektor infrastruktur, perumahan, dan layanan publik lainnya. Berdasarkan data yang tersedia, tercatat bahwa Kota Palembang mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Penelitian ini juga akan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan urbanisasi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu kesenjangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah rendahnya efektivitas kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam menangani arus urbanisasi di Kota Palembang. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, hasil yang dicapai masih belum optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka urbanisasi yang berlanjut, serta tantangan yang terus berkembang terkait dengan pemukiman kumuh, pengangguran, dan ketimpangan sosial.

Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) telah berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan penanganan urbanisasi, masih ada hambatan dalam koordinasi, baik internal antar instansi maupun dengan sektor swasta dan masyarakat. Kurangnya sinkronisasi kebijakan, integrasi data yang tidak optimal, dan perbedaan prioritas antar lembaga menghambat tercapainya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam upaya penanganan urbanisasi yang lebih terstruktur dan efisien.

Kesenjangan lainnya terletak pada kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan urbanisasi. Walaupun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi publik, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kolaborasi dalam mengelola urbanisasi masih terbatas. Ini menyebabkan rendahnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, yang pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, meskipun telah dilakukan beberapa program pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan, masih ada keterbatasan dalam kompetensi terkait pengelolaan data kependudukan dan infrastruktur perkotaan. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan dalam penyusunan kebijakan yang berbasis data yang akurat dan terkini, yang sangat penting untuk merencanakan dan mengelola urbanisasi dengan lebih baik.

Kesenjangan berikutnya adalah masalah sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan urbanisasi. Keterbatasan dalam integrasi data ini menyebabkan inkonsistensi dalam pemantauan dan pelaporan arus urbanisasi. Padahal, sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan keandalan laporan yang digunakan untuk mengidentifikasi tren dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Penelitian terkait Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang masih terbatas, terutama yang mengkaji secara mendalam tentang koordinasi antar pemangku kepentingan, pengelolaan data kependudukan, dan integrasi sistem informasi yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan urbanisasi di daerah dengan tantangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang kompleks. Hal ini menciptakan research gap yang perlu diisi, yaitu bagaimana kolaborasi antar lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, dan integrasi sistem informasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pengelolaan urbanisasi di Kota

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa Urbanisasi merupakan fenomena yang sangat berdampak pada perkembangan kawasan perkotaan, termasuk kualitas permukiman di kota-kota besar. Banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami dampak urbanisasi dan bagaimana penanganannya, terutama dalam konteks kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah satu penelitian yang relevan dengan topik ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Angel & Nasution (2023) dalam studi mereka yang berjudul *"Kolaborasi Pemerintah dengan Stakeholders dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Belawan Sicanang, Kota Medan"*. Penelitian ini menunjukkan bahwa program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Medan berhasil mengurangi kawasan kumuh dengan melibatkan berbagai pihak dalam kolaborasi yang solid, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Temuan ini menyoroti bahwa kolaborasi yang melibatkan berbagai stakeholders sangat penting untuk menciptakan ruang yang lebih baik bagi permukiman yang terdampak

Selain itu, Firmansyah & Hasri (2024) dalam penelitian mereka tentang *"Strategi Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Barat"* juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendukung inovasi daerah melalui platform *innovation hub*. Mereka menyarankan bahwa *innovation hub* dapat menjadi katalisator bagi berbagai ide inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah, yang juga dapat digunakan untuk mengatasi dampak dari urbanisasi. Dengan memfasilitasi kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, *innovation hub* dapat mempercepat implementasi program-program yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup masyarakat yang terkena dampak urbanisasi

Penelitian lain yang relevan adalah Firsia Asha Sabitha (2022) yang melakukan analisis tentang *"Pengaruh Urbanisasi terhadap Ketersediaan Lahan Permukiman di Kota Surabaya"*. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana tingginya tingkat urbanisasi di Surabaya berakibat pada semakin sempitnya lahan untuk permukiman yang layak huni. Dengan semakin banyaknya migrasi penduduk ke kota-kota besar, ketersediaan lahan yang sesuai untuk pembangunan rumah menjadi sangat terbatas, yang pada gilirannya menyebabkan harga tanah semakin mahal. Temuan ini menunjukkan bahwa urbanisasi memperburuk ketidaktersediaan lahan permukiman yang memadai, sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia

Dewi (2025) dalam penelitian mereka tentang *"Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang"* juga memberikan wawasan penting mengenai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menunjukkan bagaimana keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan cara berkolaborasi antara berbagai tingkatan pemerintahan, yang memungkinkan program penanganan kawasan kumuh untuk dijalankan dengan lebih efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya peran bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah permukiman kumuh yang banyak terjadi akibat urbanisasi

Terakhir, Kunariyanti & Yuwono (2019) dalam penelitiannya *"Inovasi Pemerintah Daerah Berbasis Kolaborasi, Bandung Creative City"* menunjukkan bagaimana Bandung berhasil mengembangkan inovasi dengan mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Penelitian ini menggambarkan bahwa pengembangan kota

kreatif tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kontribusi aktif dari komunitas yang terlibat. Hal ini sangat relevan dalam konteks urbanisasi, di mana kolaborasi ini bisa diterapkan untuk menciptakan solusi kreatif bagi pengelolaan kawasan perkotaan yang terus berkembang

Penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak—pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengatasi dampak urbanisasi dan meningkatkan kualitas permukiman. Temuan-temuan ini memberikan landasan penting bagi penelitian "Collaborative Governance dalam Penanganan Arus Urbanisasi di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan", yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi ini dapat diimplementasikan secara efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Kota Palembang dalam mengelola urbanisasi yang terus berkembang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji implementasi Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek dampak urbanisasi secara sektoral, penelitian ini secara spesifik mengevaluasi bagaimana berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan untuk mengelola urbanisasi dengan pendekatan yang terintegrasi. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam kajian Collaborative Governance di daerah yang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang kompleks akibat urbanisasi yang pesat.

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dalam hal pendekatan analisis yang menggabungkan empat dimensi utama dari Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi Collaborative Governance dalam konteks masalah sosial dan politik, penelitian ini menjadi salah satu yang pertama yang secara mendalam mengkaji bagaimana kolaborasi antara pemangku kepentingan dapat mengatasi masalah arus urbanisasi secara efektif di kota besar dengan tingkat urbanisasi yang tinggi.

Penelitian ini juga unik karena tidak hanya menilai keberhasilan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan urbanisasi, tetapi juga mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan-hambatan struktural, kultural, dan administratif yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kendala-kendala yang diperhatikan meliputi perbedaan prioritas antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketidakcocokan sistem informasi antar lembaga yang menghambat efektivitas kolaborasi. Fokus penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang penting dalam memahami tantangan nyata yang dihadapi oleh pemerintah kota dalam menerapkan Collaborative Governance, yang sering kali terabaikan dalam studi-studi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada teori dan desain kebijakan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis temuan empiris kepada Pemerintah Kota Palembang untuk memperbaiki kualitas Collaborative Governance dalam penanganan urbanisasi, dengan memperhatikan koordinasi antar instansi, pengelolaan data

kependudukan yang lebih terintegrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi kota-kota lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola urbanisasi dengan melibatkan kolaborasi efektif antar berbagai pemangku kepentingan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang.

II. METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi secara mendalam mengenai implementasi Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang. Pendekatan ini dipilih karena tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pengalaman, tantangan, dan strategi yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengelola urbanisasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi faktual yang ada, kebijakan yang diterapkan, dan kendala yang dihadapi dalam penanganan urbanisasi di daerah tersebut.

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan keadaan yang ada secara komprehensif, termasuk tantangan yang dihadapi dalam proses kolaborasi antar lembaga dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Collaborative Governance dalam mengelola arus urbanisasi. Menurut Nurdin dan Hartati (2019:42), metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Penelitian deskriptif kualitatif dapat menyesuaikan dengan dinamika lapangan, sehingga peneliti dapat mengakomodasi perubahan informasi yang terjadi selama proses pengumpulan data (Simangunsong, 2017:190).

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan dari pejabat terkait di DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL, serta pemangku kepentingan lainnya mengenai pengelolaan urbanisasi dan kebijakan yang telah diterapkan. Observasi dilakukan untuk memantau implementasi kebijakan Collaborative Governance dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antar lembaga. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait kebijakan pengelolaan urbanisasi, laporan tahunan, dan temuan terkait yang dapat mendukung analisis.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala DISDUKCAPIL Kota Palembang, pejabat pengelola urbanisasi, serta perwakilan dari KESBANGPOL dan stakeholder terkait lainnya. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan dan program penanganan urbanisasi. Sedangkan informan pendukung dipilih menggunakan teknik Snowball Sampling, yaitu melalui rekomendasi dari informan utama untuk menggali pandangan masyarakat atau pihak terkait yang memiliki informasi relevan.

Penelitian ini dilakukan di kantor DISDUKCAPIL Kota Palembang dan KESBANGPOL,

serta beberapa lokasi terkait dengan pengelolaan urbanisasi dan perencanaan kota, seperti lokasi pemukiman kumuh, kawasan permukiman, dan proyek pembangunan kota. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kolaborasi antar lembaga, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk, Pemerintah Kota Palembang dalam menyikapi pengendalian penduduk untuk penanganan arus urbanisasi yang meningkat setiap tahunnya telah menerapkan model Collaborative Governance antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL). Proses ini mencakup berbagai tahap penting dalam kolaborasi antara kedua lembaga, yang bertujuan untuk mengatasi tantangan urbanisasi di Kota Palembang. Model dan proses Collaborative Governance ini diuraikan dalam beberapa dimensi berikut:

a. Kondisi Awal

Keadaan awal menggambarkan permasalahan yang dihadapi Kota Palembang terkait dengan urbanisasi yang meningkat pesat. Dalam konteks Collaborative Governance, kondisi awal ini mencerminkan ketidakseimbangan sumber daya yang memaksa pemerintah daerah untuk menggalang kekuatan institusional melalui kolaborasi lintas sektor. Meningkatnya urbanisasi dalam lima tahun terakhir telah menciptakan ketidakmampuan institusional dalam menangani masalah urbanisasi secara terpisah, sehingga diperlukan kolaborasi yang lebih komprehensif antara DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL.

Kolaborasi ini mencerminkan adanya interdependensi antara kedua lembaga, di mana DISDUKCAPIL berperan sebagai sektor utama dengan kapasitas dalam pengelolaan data kependudukan dan KESBANGPOL sebagai mitra pendukung yang mengelola dimensi politik dan kebangsaan dalam proses kolaborasi. Ketidakpastian dalam dinamika perpindahan penduduk mensyaratkan kepemimpinan fasilitatif dari DISDUKCAPIL untuk memastikan bahwa kolaborasi ini berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Insentif partisipasi bagi kedua lembaga terletak pada pencapaian target penurunan urbanisasi pada tahun 2026, yang menjadi agenda utama dalam pengelolaan arus urbanisasi di Kota Palembang.

b. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan dalam Collaborative Governance ini melibatkan proses yang transparan dan konsisten, dengan partisipasi semua aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL mengkoordinasikan upaya untuk menurunkan angka urbanisasi dengan membentuk struktur yang memungkinkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Mekanisme perencanaan kelembagaan ini memberikan panduan yang jelas tentang prosedur kerja sama, aturan dasar, serta partisipasi dalam proses kolaborasi.

Dalam hal ini, DISDUKCAPIL menerapkan kebijakan yang memperketat persyaratan

administrasi untuk pendatang baru, seperti memastikan bahwa mereka sudah memiliki tempat tinggal atau pekerjaan di Kota Palembang. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian urbanisasi yang dilakukan dengan kolaborasi antara DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL untuk memastikan pengendalian arus urbanisasi yang lebih efektif.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif adalah komponen krusial dalam Collaborative Governance. DISDUKCAPIL, sebagai koordinator utama dalam proses ini, memainkan peran penting dalam memfasilitasi interaksi antara berbagai instansi dan memastikan bahwa kepentingan masing-masing pihak dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan fasilitatif ini tidak hanya memastikan kelancaran komunikasi antara instansi pemerintah, tetapi juga bertindak sebagai mediator dalam menghadapi perbedaan pendapat dan kepentingan antar sektor yang terlibat.

Peran DISDUKCAPIL dalam membangun dialog dan membentuk konsensus sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa memiliki kontribusi dalam pengelolaan urbanisasi di Kota Palembang. Selain itu, kepemimpinan fasilitatif yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL dapat mengurangi potensi ego sektoral yang sering menjadi hambatan dalam kolaborasi antar lembaga.

d. Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif dimulai dengan dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL memfasilitasi diskusi untuk mengenali masalah, peluang, dan kekurangan dalam penanganan urbanisasi. Pertemuan langsung ini membangun kepercayaan antar pihak dan memperkuat komitmen mereka dalam melaksanakan program bersama.

Selain itu, keberhasilan Collaborative Governance ini sangat bergantung pada kepercayaan yang dibangun melalui interaksi yang transparan dan saling menghormati antar pemangku kepentingan. (Sulistyowati *et al*, 2024) Dialog dan pertukaran informasi yang efektif antara DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam menangani isu-isu kompleks seperti urbanisasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.

Proses Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kolaborasi yang efektif antara DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL telah membentuk dasar yang kuat untuk mengatasi tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Dengan terus mengoptimalkan proses kolaborasi, meningkatkan kepemimpinan fasilitatif, dan memperkuat mekanisme evaluasi, diharapkan target penurunan urbanisasi pada tahun 2026 dapat tercapai dan Kota Palembang dapat mencapai stabilitas sosial-ekonomi yang lebih baik.

3.2. Proses Hambatan-Hambatan dalam Upaya Menciptakan Kolaborasi yang Efektif dalam Penanganan Arus Urbanisasi di Kota Palembang

Urbanisasi merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian serius di Kota Palembang. Fenomena ini melibatkan perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih sejahtera. Dampak urbanisasi tidak hanya berpengaruh pada kepadatan penduduk, tetapi juga dapat menyebabkan pemukiman kumuh, peningkatan angka

pengangguran, dan kemiskinan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penanganan arus urbanisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah Kota Palembang.

Dalam rangka mempercepat penanganan arus urbanisasi, dibutuhkan kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang dapat menghambat upaya kolaborasi tersebut. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk koordinasi antar lembaga, komitmen yang kurang, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan pemahaman antar pemangku kepentingan. Berikut adalah hambatan-hambatan dalam upaya menciptakan kolaborasi yang efektif dalam percepatan penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang:

A. Perbedaan Pemahaman dan Prioritas Antar Pemangku Kepentingan

Hambatan utama dalam menciptakan kolaborasi yang efektif adalah adanya perbedaan pemahaman dan prioritas di antara para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan, seperti DISDUKCAPIL dan Badan KESBANGPOL, memiliki latar belakang, kepentingan, dan perspektif yang berbeda terhadap isu urbanisasi. DISDUKCAPIL mungkin memandang urbanisasi sebagai isu yang harus ditangani secara komprehensif melalui berbagai program, sementara KESBANGPOL lebih fokus pada aspek kesatuan bangsa, sehingga tidak terlalu menekankan pada urbanisasi.

Perbedaan pemahaman ini dapat menyebabkan kesulitan dalam koordinasi dan dalam menyatukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menurunkan angka urbanisasi secara efektif. Masing-masing pemangku kepentingan mungkin memiliki agenda dan target yang berbeda, sehingga diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk mengintegrasikan pemangku kepentingan dalam pencapaian target bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan, perbedaan pemahaman ini mempengaruhi efektivitas kolaborasi antara DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL dalam penanganan urbanisasi. Setiap pemangku kepentingan memiliki prioritas yang berbeda, sehingga kolaborasi mereka kurang maksimal.

B. Koordinasi yang Kurang Optimal

Selain perbedaan pemahaman, koordinasi yang kurang optimal di antara pemangku kepentingan juga menjadi hambatan besar dalam upaya kolaborasi. Koordinasi yang lemah dapat menghambat sinergi dan integrasi program-program yang dijalankan oleh berbagai pihak. (Harimbawa, Sumaryadi, Djohan, Mulyati, & Achmad, 2022)

Pada level pemerintah daerah, koordinasi yang kurang baik antara dinas-dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dapat menyebabkan program penanganan urbanisasi tidak berjalan secara terintegrasi. Hal ini mengurangi efektivitas dan efisiensi upaya penurunan angka urbanisasi.

Koordinasi yang lemah juga dapat terjadi antara instansi pemerintah yang terlibat, yang mengakibatkan duplikasi tugas atau tumpang tindih, yang justru memperburuk kualitas program yang dijalankan. Komunikasi yang kurang efektif juga menjadi hambatan besar dalam kolaborasi ini. Ketidakjelasan dalam penyampaian informasi antar lembaga menghambat pengambilan keputusan yang berbasis pada data yang akurat dan relevan.

C. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan Collaborative Governance dalam penanganan urbanisasi. Sumber daya yang terbatas, baik dari segi anggaran maupun tenaga profesional, dapat menghambat implementasi program-program yang

diperlukan untuk menangani urbanisasi secara optimal. Terbatasnya anggaran dapat membatasi jangkauan program dan mengurangi kualitas intervensi yang dilakukan, seperti penyuluhan kepada masyarakat mengenai regulasi urbanisasi.

Selain itu, keterbatasan tenaga ahli dan sarana untuk mendukung pelaksanaan program juga mempengaruhi kualitas pengawasan dan pemantauan urbanisasi. Keterbatasan sumber daya manusia dapat memperlambat pengolahan data serta menghambat efektivitas program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palembang.

D. Budaya Silo dan Ego Sektoral

Budaya silo, yang merujuk pada kecenderungan sektor-sektor atau organisasi untuk bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai, serta ego sektoral, yang menekankan kepentingan masing-masing sektor tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama, menjadi hambatan besar dalam kolaborasi lintas sektor yang dibutuhkan dalam mengatasi urbanisasi.

Dalam beberapa kasus, setiap sektor yang terlibat cenderung bekerja sendiri-sendiri dan enggan berbagi informasi serta sumber daya dengan instansi lain. Hal ini menyebabkan kolaborasi yang terjadi menjadi terfragmentasi dan tidak optimal, padahal penanganan urbanisasi memerlukan pendekatan terpadu dari semua sektor terkait.

Terdapat beberapa hambatan utama dalam implementasi Collaborative Governance untuk penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang. Pertama adalah perbedaan pemahaman dan prioritas antar pemangku kepentingan, kedua adalah koordinasi yang kurang optimal antar instansi, ketiga adalah keterbatasan sumber daya, dan terakhir adalah budaya silo dan ego sektoral yang menghambat kolaborasi lintas sektor. Mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk memastikan kolaborasi yang lebih efektif dalam penanganan urbanisasi yang semakin meningkat di Kota Palembang.

3.3. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Palembang dalam Meningkatkan Kolaborasi dalam Penanganan Arus Urbanisasi

Pemerintah Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kolaborasi efektif dalam penanganan arus urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam rangka menghadapi tantangan ini, beberapa langkah strategis telah diambil oleh Pemerintah Kota Palembang, meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal koordinasi antar instansi, sumber daya, dan budaya silo di antara pemangku kepentingan.

1. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi

Salah satu langkah utama yang diambil oleh Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan kolaborasi adalah dengan memperbaiki koordinasi antar instansi terkait, khususnya antara DISDUKCAPIL dan Badan KESBANGPOL. Koordinasi yang baik antara kedua lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa data kependudukan dan program-program terkait urbanisasi dapat saling melengkapi. Wawancara dengan Kepala DISDUKCAPIL Kota Palembang menyebutkan, "Kami terus bekerja sama dengan Badan KESBANGPOL dan lembaga lain untuk memastikan data dan informasi terkait urbanisasi diperoleh secara akurat dan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat."

Untuk mengoptimalkan koordinasi, Pemerintah Kota Palembang juga telah membentuk forum koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Forum ini bertujuan untuk menyatukan prioritas dan pemahaman di antara pihak-pihak yang terlibat.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Upaya penting lainnya yang dilakukan adalah dengan menguatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam penanganan urbanisasi, baik di level pemerintah daerah maupun masyarakat. Pemerintah Kota Palembang melalui DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL telah menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan staf dalam menyusun kebijakan yang berbasis data akurat. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendataan Penduduk DISDUKCAPIL, "Kami telah mengadakan pelatihan berkala untuk staf yang terlibat dalam pengelolaan data kependudukan, agar mereka dapat lebih memahami standar terbaru terkait pengelolaan urbanisasi."

Pelatihan ini bertujuan agar para pegawai dapat lebih memahami dan menerapkan standar akuntansi dan teknik verifikasi data dengan lebih baik. Meskipun sudah ada pelatihan, upaya untuk menguatkan kapasitas SDM ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

3. Perbaikan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

Pemerintah Kota Palembang juga berupaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan data kependudukan melalui implementasi sistem informasi yang lebih modern dan terintegrasi. Menurut Kepala DISDUKCAPIL, "Kami sedang dalam proses implementasi sistem informasi yang lebih canggih untuk memudahkan pengelolaan data penduduk dan penanganan urbanisasi secara lebih efisien." Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki akurasi data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan pengelolaan urbanisasi di Kota Palembang.

Sistem yang terintegrasi juga akan membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan mempermudah verifikasi data, sehingga mempermudah identifikasi kebutuhan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Untuk memastikan bahwa kolaborasi dalam penanganan urbanisasi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kota Palembang juga berusaha meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan. Wawancara dengan pejabat terkait menyebutkan, "Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik." Dengan meningkatkan transparansi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami upaya yang dilakukan untuk mengatasi arus urbanisasi dan memberikan masukan yang konstruktif.

5. Pembentukan Aliansi dan Koalisi Antar Lembaga

Pemerintah Kota Palembang juga membentuk aliansi lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi, sektor swasta, dan masyarakat dalam menangani arus urbanisasi. Aliansi ini berfungsi sebagai wadah untuk koordinasi antar instansi, mengoptimalkan sumber daya, dan menyatukan tujuan bersama dalam mengelola urbanisasi.

Aliansi tersebut diharapkan dapat mendorong kolaborasi yang lebih terkoordinasi dan efektif, mengingat bahwa urbanisasi merupakan isu yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Forum-forum kerja yang terorganisir secara rutin memastikan keberlanjutan komunikasi dan evaluasi bersama untuk menilai apakah target pengurangan urbanisasi pada tahun 2026 dapat tercapa.

Pemerintah Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya yang signifikan untuk meningkatkan kolaborasi dalam penanganan arus urbanisasi. Peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan SDM, implementasi sistem informasi yang modern, dan peningkatan

transparansi adalah beberapa langkah kunci yang telah diambil. Meskipun tantangan dalam koordinasi, sumber daya, dan budaya silo tetap ada, komitmen yang kuat untuk mengatasi urbanisasi melalui kolaborasi antar instansi diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan efektif dalam mengurangi angka urbanisasi di Kota Palembang pada tahun 2026.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam penanganan urbanisasi di Kota Palembang masih mengalami berbagai tantangan meskipun sudah ada upaya signifikan dalam memperbaiki kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Temuan utama mengungkapkan bahwa kurangnya koordinasi antar unit pengelola pemerintahan dan ketidakmaksimalan peran masyarakat dalam kolaborasi menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki partisipasi masyarakat dalam kebijakan urbanisasi, ketidaksiapan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan masih menjadi masalah besar. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya membangun dialog yang lebih terbuka dan memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat agar kolaborasi dapat berjalan lebih efektif.

Temuan ini menerima hasil penelitian Angel & Nasution (2023) yang menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi antara berbagai pihak telah dilakukan di Kota Medan dalam program KOTAKU, pengelolaan kawasan kumuh masih menghadapi kendala besar dalam koordinasi antar unit pengelola dan peran aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut. Penelitian ini juga menerima temuan Firmansyah & Hasri (2024) yang menekankan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa Barat menghadapi kendala kapasitas dan pemahaman antar stakeholders yang menyebabkan ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan. Namun, temuan ini menolak penelitian tersebut dengan menunjukkan bahwa di Kota Palembang, meskipun kendala koordinasi antar pemangku kepentingan ada, masalah utama terletak pada kurangnya sistem informasi yang terintegrasi, yang mengarah pada kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun adopsi kebijakan kolaboratif di Palembang telah memberikan hasil yang positif, peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan masih sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan Sabitha (2022), yang mengidentifikasi bahwa urbanisasi yang pesat mengakibatkan penurunan ketersediaan lahan untuk permukiman yang layak huni. Namun, temuan penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan data dan kolaborasi yang lebih terstruktur sangat diperlukan untuk mengelola masalah tersebut dengan lebih efektif. Dalam hal ini, temuan ini menolak penelitian Firsas Sabitha (2022) yang lebih banyak memfokuskan pada pengelolaan lahan dan infrastruktur, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa kurangnya integrasi data di antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kendala utama dalam perencanaan dan implementasi kebijakan urbanisasi yang efektif.

Lebih lanjut, temuan ini memperkuat teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yang menyatakan bahwa dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap proses kolaboratif adalah elemen kunci dalam mencapai tujuan bersama. Penelitian ini menerima bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kurangnya koordinasi dan peran aktif masyarakat tetap menjadi hambatan utama yang harus diperbaiki agar kolaborasi ini lebih efektif. Temuan ini

menolak bahwa kolaborasi dapat berjalan efektif hanya dengan kebijakan yang diterapkan tanpa memperhatikan pengelolaan internal yang terstruktur dan keterlibatan aktif masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Dewi (2025) yang menyatakan bahwa meskipun kolaborasi pemerintah pusat dan daerah di Tanjungpinang berhasil dalam penanganan kawasan kumuh, koordinasi antara unit pengelola yang memiliki kewenangan berbeda tetap menjadi kendala dalam implementasi kebijakan

Selain itu, temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sistem informasi yang mendukung pengelolaan data urbanisasi menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam efektivitas kolaborasi. Penelitian Kunariyanti & Yuwono (2019) yang menyoroti bahwa sistem informasi yang baik harus didukung dengan edukasi yang fungsional, sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa meskipun sudah ada sistem peringatan dini dan data terkait urbanisasi, kurangnya integrasi informasi di antara berbagai level pemerintahan menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data

Secara keseluruhan, temuan utama dari penelitian ini memperkuat pentingnya kolaborasi yang terstruktur dan efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam penanganan urbanisasi di Kota Palembang. Namun, temuan ini juga menolak bahwa kebijakan yang diterapkan hanya bergantung pada adopsi sistem atau standar tertentu, karena pengelolaan data yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM, dan koordinasi antar unit pengelola keuangan sangat penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan urbanisasi dan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan. Temuan ini menerima bahwa meskipun sistem informasi dan koordinasi yang baik sangat diperlukan, peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan tetap menjadi faktor utama yang perlu diperbaiki untuk mencapai keberhasilan dalam penanganan urbanisasi dan kawasan kumuh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Collaborative Governance di Kota Palembang telah menunjukkan perkembangan meskipun menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun terdapat upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) dalam mengelola urbanisasi, tantangan yang signifikan masih ada. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terjalin, masih ada hambatan besar seperti kurangnya koordinasi antar instansi, perbedaan prioritas, serta kurangnya sistem informasi yang terintegrasi. Hal ini mengarah pada ketidakmaksimalan dalam mengelola arus urbanisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Collaborative Governance antara lain adalah kompetensi SDM, koordinasi antar instansi, dan pengelolaan data. Meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM, masih terdapat keterbatasan dalam pengelolaan data dan integrasi informasi, yang menyebabkan perencanaan kebijakan tidak selalu berbasis pada data yang akurat.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan kolaborasi meliputi perbaikan dalam pengelolaan data, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan transparansi dalam proses kebijakan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, budaya silo, serta perbedaan pemahaman antar pemangku

kepentingan yang menghambat efektivitas kebijakan.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan ruang lingkup, yang hanya terfokus pada penanganan urbanisasi di Kota Palembang selama periode tertentu. Selain itu, informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan purposive sampling, yang membatasi generalisasi temuan penelitian ke daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda..

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work) Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi implementasi Collaborative Governance di kota-kota lain dengan karakteristik yang berbeda. Penelitian komparatif yang melibatkan beberapa daerah di Indonesia dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam penanganan urbanisasi. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi pengembangan sistem informasi yang lebih efisien dan penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan urbanisasi untuk mendukung keberlanjutan kolaborasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Palembang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), serta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, dan kesempatan yang sangat berarti dalam melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan, baik informan utama maupun pendukung, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga serta berbagi pengalaman selama proses pengumpulan data. Tanpa kontribusi dari para informan, penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alcaide Manthey, N. (2025). Post-growth cities in Germany: Challenges and opportunities of collaborative governance. *Cities*, 163(May), 106064. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106064>
- Ambrose, G., Kim, J., & Siddiki, S. (2024). Evaluating conflict in collaborative environmental governance: A study of environmental justice councils. *Review of Policy Research*, (May), 12614. <https://doi.org/10.1111/ropr.12614>
- Angel, A., & Nasution, M. A. (2023). Kolaborasi Pemerintah Dengan Stakeholders Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 69–76. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3528>
- Dewi, F. R. (2025). KUMUH SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: KAWASAN KUMUH PULAU PENYENGAT , KOTA TANJUNGPINANG) Collaboration Between the Central Government and Local Government in Improving the Quality of Slum Areas as A Sustainable Development Effort, 04(April), 23–33.

- Firmansyah, J., & Hasri, D. A. (2024). INNOVATION HUB: STRATEGI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT) Innovation Hub: The Local Government ' s Collaborative Strategy as a Sustainable Development Effort (A Study in West Sumbawa Regency), 8(3), 43–52.
- Firsa Asha Sabitha. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Urbanisasi Terhadap Ketersediaan Lahan Lahan Permukiman Perumahan Di Kota Surabaya. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 19–26. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.268>
- Harimbawa, G., Sumaryadi, I. N., Djohan, D., Mulyati, D., & Achmad, M. (2022). The Collaborative Governance with Focus on Controlling the Illegal Mining in Indonesia. *Croatian International Relations Review*, 28(89), 209–224. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0012>
- Kunariyanti, D., & Yuwono, T. (2019). Inovasi Pemerintah Daerah Berbasis Kolaborasi, Bandung Creative City. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 231. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/issue/view/1339>
- Mao, Z., & Zhu, Y. (2025). Does e-government integration contribute to the quality and equality of local public services? Empirical evidence from China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 41599. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04539-y>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.
- Polzer, T., & Öner, S. (2024). Digital Accountability in Colaborative Public Governance in Times of Crisis: Analysing the Debate in a Polarized Social Forum. *Abacus*, (May), 12351. <https://doi.org/10.1111/abac.12351>
- Sulistiyowati, F., Tyas, H. S., & Puspitasari, C. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK DAULAT SAMPAH COLLABORATIVE GOVERNANCE FOR WASTE SOVEREIGNITY TPA Piyungan menerima Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Sumber : Kumparan . id 2023 Sebenarnya , menurut UU No . 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan, 50(2), 132–143. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i2.4649>
- Simangunsong, F. (2017). Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tremblay, D., Usher, S., Bilodeau, K., & Touati, N. (2024). The role of collaborative governance in translating national cancer programs into network-based practices: A longitudinal case study in Canada. *Journal of Health Services Research and Policy*, (May), 2025. <https://doi.org/10.1177/13558196241300109>
- Yahya, A. S., Kusmana, D., Ismunarta, & Sururama, R. (2024). Collaborative Governancedalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Media Birokrasi*, 6(1), 54–84. Retrieved from <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/4151/1873>